



DPRD Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024

Bupati Ingatkan SKPD untuk Serap Anggaran

DPRD Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah menyetujui hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, untuk dijadikan peraturan daerah (Perda).

Persetujuan tersebut, dibahas dalam sidang paripurna, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, dan anggota DPRD itu sendiri, pada Rabu (2/7).

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, mengucapkan terimakasih atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif, dalam menyusun dan menelaah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

"Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang telah menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Raperda ini menjadi Perda," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan anggaran yang per 1 Juli 2025 baru mencapai 27,36 persen.

"Perlunya SKPD untuk segera menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Presiden Nomor

72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, menggantikan Perpres sebelumnya yang kini telah dicabut," ucapnya.

Kemudian, Fransiskus Diaan meminta, agar pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik dioptimalkan agar tidak menimbulkan SILPA yang tinggi.

"Perlunya juga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dari sektor pajak dan retribusi, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber baru seperti kratom, wisata alam, dan pajak hiburan," ujarnya.

Menyikapi pembangunan infrastruktur, Fransiskus Diaan menyatakan, pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, akan terus mengupayakan dukungan dana dari pusat melalui DAK Infrastruktur Perbatasan dan Inpres Jalan Daerah.

"Termasuk juga dengan memperkuat lobi politik dan melibatkan DPRD di

semua tingkatan. Selain itu, penguatan BUMD dan peningkatan pelayanan PDAM di wilayah Putussibau, serta percepatan pemanfaatan jaringan air bersih Sungai Potan juga menjadi fokus perbaikan ke depan," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati, Kapuas Hulu, Sukardi telah menyampaikan penyerapan APBD Kapuas Hulu tahun 2024 terealisasi dengan baik, dan berhasil meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Memang yang tidak terealisasi dengan baik, menjadi SILPA, kalau tidak salah SILPA APBD Kapuas Hulu tahun 2024 kurang lebih Rp 15 miliar," ujarnya, usai menyampaikan pidato pengantar bupati Kapuas Hulu terhadap pembahasan Raperda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu 25 Juni.

Selain itu juga jelas Wabup, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam laporan keuangan tahun anggaran 2024, tetap kembali bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI.

"Artinya laporan keuangan

an Pemda Kapuas Hulu tahun anggaran 2024, sudah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalbar, dan berhasil mendapatkan opini WTP," ucapnya.

Sukardi menyatakan, opini WTP tersebut dapat tercapai, karena dukungan dari semua pihak, baik Eksekutif maupun Legislatif. "Ini berkat kerjasama yang baik semua pihak," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, menjelaskan terkait penyampaian pertanggungjawaban APBD,

merupakan keharusan bagi Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Legislatif.

"Pastinya merupakan ketentuan undang-undang, dan itu disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir," ujarnya.

Hasil rapat paripurna kali ini, selanjutnya kata Yanto, tentunya ada tahapan yaitu akan dibahas lagi lewat rapat-rapat paripurna lainnya. "Untuk sekarang ini kami di legislatif masih sifatnya mendengar saja," ungkapnya. **(sahirul hakim)**

IST

PARIPURNA. - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, Ketua DPRD Yanto, dan Wakil DPRD Ali Topan, usai Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu kemarin.

